



# DIY Sudah Kebal

**JOGJA-DIY mengklaim kekebalan komunal atau herd immunity sudah terbentuk di Bumi Mataram.**

Jumali & Sugeng Pranyoto  
 redaksi@harianjogja.com

Salah satu indikator kekebalan komunal terbentuk di DIY karena capaian vaksinasi sudah tinggi. DIY sudah mencapai *herd immunity* berdasarkan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian

► Mendagri telah menyeru 15 daerah aglomerasi di Indonesia termasuk DIY.

► Berdasarkan data di Dinkes DIY, hingga Rabu (8/12) tercatat, capaian vaksinasi di DIY dosis pertama mencapai 97,09%.

dalam rapat koordinasi terkait libur Natal dan Tahun Baru 2022, Rabu (8/12).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemda DIY, Sumadi, mengatakan dalam rapat terbatas tersebut, Mendagri menyampaikan telah menyeru ke 15 daerah aglomerasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei DIY hasilnya cukup tinggi. "Tadi [kemarin] disampaikan Pak Menteri.

Mereka menyeru ke beberapa daerah, khususnya daerah aglomerasi. Untuk *herd immunity* sudah tinggi, termasuk DIY. Indikatornya vaksinasi yang kita lakukan lebih dari 70 persen," kata Sumadi, Rabu (8/12).

Kepala Dinas Kesehatan

(Dinkes) DIY, Pembajun Setyaningastutie, enggan berkomentar banyak terkait dengan masuknya DIY dalam sembilan wilayah yang telah mencapai *herd immunity*. Kendati demikian,

ia mengakui secara teori, jika vaksinasi sudah mencapai di atas 85% maka seharusnya sudah tercapai *herd immunity*. "Cuma, *herd immunity* itu ada di wilayah tertentu," katanya.

Berdasarkan data di Dinkes DIY, hingga Rabu (8/12) tercatat dari sasaran 2,8 juta penduduk, capaian vaksinasi di DIY dosis pertama telah mencapai 97,09%.

► Halaman 10

## KEKEBALAN KELOMPOK DI BUMI MATARAM

Kekebalan kelompok (*herd immunity*) diperkirakan sudah terbentuk di DIY. Salah satu indikatornya adalah capaian vaksinasi yang tinggi. Selain itu, kondisi Covid-19 di Bumi Mataram sudah cukup terkendali.

### Vaksinasi di DIY

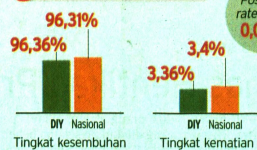
Hingga Rabu (8/12)



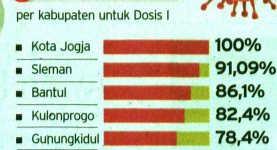
### Vaksinasi Dosis II <100%



### Kasus Covid-19 di DIY



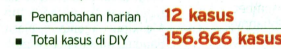
### Realisasi Vaksinasi



### Kasus Covid-19 di DIY

Rabu (8/12)

#### Penambahan kasus

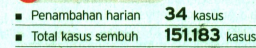


#### Rincian

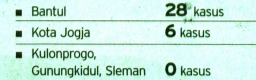


Uji sampel  
10.279 sampel

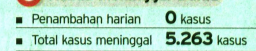
### Kasus Sembuh



#### Rincian



### Kasus Meninggal Dunia



### DIY Sudah...

Sementara berdasarkan realisasi vaksinasi per kabupaten, untuk dosis pertama, Kota Jogja telah tervaksin 100%, Sleman 91,09%, Bantul 86,1%, Kulonprogo 82,4% dan Gunungkidul 78,4%.

Sedangkan dosis kedua, vaksinasi di DIY baru mencapai 85,81%. *(Lebih lengkap lihat grafis)*

Pembaju enggan mengungkapkan mengenai indikator pencapaian *herd immunity*, apakah terkait dengan capaian vaksinasi dan penurunan kasus harian. Padahal berdasarkan data di Dinkes tercatat saat ini tingkat kesembuhan di DIY mencapai 96,36% atau di atas angka nasional 96,31%. Sementara angka kematian di DIY 3,36%, di bawah angka nasional 3,4%, sedangkan *positivity rate* di DIY hingga Selasa (7/12) tercatat 0,08%.

Lebih lanjut Pembaju justru lebih memberikan perhatian terhadap tingkat mobilitas warga luar DIY. Saat ini mobilitas luar DIY ke DIY semakin masif. "Untuk itu, protokol kesehatan harus terus dimaksimalkan," katanya.

Sebelumnya Tito Karnavian menyebut salah satu alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dibatalkan karena sembilan wilayah aglomerasi mungkin sudah mencapai kekebalan kelompok. "Vaksinasi kita juga membaik ya kan. Kemudian, survei yang sementara ada dua. Kemendagri dan Kemenkes juga menunjukkan bahwa tingkat antibodi kita cukup tinggi, sehingga kita kemungkinan sudah mencapai *herd immunity* dari sembilan daerah aglomerasi," ujar Tito tanpa merinci wilayah yang masuk aglomerasi tersebut.

### Langkah Tegas

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, menambahkan Pemda DIY bersama dengan pemkab dan pemkot akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran saat libur Nataru. Terutama kerumunan atau pelanggaran proses di

objek wisata maupun restoran dan kafe.

"Kalau sampai terjadi pelanggaran ya kami tutup. Langkah ini tetap dilakukan sebagai antisipasi limpahan wisatawan," katanya.

Baskara Aji mengimbau wisatawan dari luar maupun warga DIY untuk tetap mematuhi proses selama libur Nataru. Terutama soal vaksinasi Corona yang menjadi syarat perjalanan.

### Perbatasan DIY

Sementara itu, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Covid-19 tetap akan memeriksa pelaku perjalanan di perbatasan DIY, meski pemerintah pusat telah menyatakan PPKM level 3 tidak jadi diterapkan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Pemeriksaan acak ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 saat libur Nataru.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan jawatannya bekerja sama dengan kepolisian, TNI dan Dinas Perhubungan DIY tetap akan memeriksa kelengkapan pelaku perjalanan secara acak di perbatasan. "Memang tidak ada penyekatan. Hanya ada pembatasan. Di Perbatasan kami tetap lakukan pemeriksaan, meski tidak ada cek poin," katanya.

Noviar mengungkapkan tetap menyiapkan 578 personel yang terdiri dari 250 personel yang akan *mobile* mengawasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sedangkan sisanya 328 personel akan ditempatkan di objek wisata.

"Nanti kami bagi dalam enam regu. Semua akan bergabung dengan TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan," katanya. Dari enam regu yang dipersiapkan, 3 regu akan bertugas di tiga lokasi perbatasan yakni Prambanan, Tempel, dan Temon.

"Nanti di sana ada pemeriksaan acak syarat perjalanan yakni wajib vaksin dosis 2 dan tes antigen. Pemeriksaan dilakukan secara acak. Dishub akan menyiapkan personel dari puskesmas untuk antigen

dan vaksin kedua," ujarnya.

Untuk wisatawan di Malioboro, Noviar menyatakan tetap memeriksa. Jika ditemukan wisatawan belum divaksin dosis kedua dan tidak membawa *swab antigen*, akan diminta meninggalkan Malioboro.

### PPKM Batal

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan alasan mengapa penyebutan istilah PPKM level 3 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru batal.

"Tolong hindari bahasa [PPKM] level 3. Kenapa, karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi Covid-19-nya, tidak semua daerah sama," kata Mendagri Tito.

Selain itu, Mendagri Tito menjelaskan World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk Covid-19. Level 1 berarti rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 tinggi, dan level 4 sangat tinggi.

Indonesia, kata Mendagri, masuk dalam kategori *low* atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi Covid-19 dan *bed occupancy ratio* (BOR) yang terkendali. "Kita bersyukur atas itu, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan agar kita tidak menerapkan [PPKM] level 3 tapi membuat pengaturan spesifik mengenai antisipasi atau penanganan penanggulangan pandemi Covid-19 di masa Nataru."

Selain itu, alasan lainnya tidak menggunakan istilah PPKM level 3 yakni karena situasi pandemi Covid-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah. "Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi Covid-19 ini karena yang kita hadapi situasi dinamis, dinamikanya bukan mingguan, melainkan harian, bahkan jam, tapi kita mengaturnya mingguan, sehingga perubahan pengaturan sudah kita lakukan berkali-kali sejak awal pandemi," ujarnya. *(JIBI Antara)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005